

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Jl. Tulip No.1 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21158



*Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan limpahkan Rahmat-Nya, maka Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat terwujud.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap. Karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini telah melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam serta terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2023-2026

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.



Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien

Liwa, 31 Maret 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON



Ds. SYA EKHUDDIN, MM
NIP. 19680913 198909 1 002



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan	
4.2 Sasaran	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
5.1 Strategi	
5.2 Arah Kebijakan	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Arah pembangunan nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah “*Pemberdayaan*”. Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan.

Sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Disyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten Maupun Pemerintah Provinsi wajib menyusun Dokumen Perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahun dimana dalam penyusunannya berpedoman pada RPD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat juga mengacu pada Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2023-2026, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program / tugas pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban



selama empat tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404)



21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat periode 2023-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 4 (Empat) tahun dengan berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi dan prioritas serta kebutuhan daerah bagi pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Selain itu, renstra merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat diukur, sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Menjabarkan gambaran dan kondisi pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon.
- b. Memudahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pekon yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pekon;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pekon;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayann masyarakat dan pekon;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan penyusunan program, evaluasi pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup sekretariat dan lingkup Dinas;

Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon

Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon; dan



- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pekon

Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pekon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pekon mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
- c. pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon.

Bidang Pemerintahan Pekon

Bidang Pemerintahan Pekon mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemerintahan pekon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Pemerintahan Pekon mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Pekon;



- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan Pekon;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan pekon; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan pekon.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, membawahi :
 - a. Sub-substansi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub-substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Sub-substansi Kelembagaan Masyarakat pekon.
- 4. Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon, membawahi :
 - a. Sub-substansi Penataan Pekon;
 - b. Sub-substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pekon; dan
 - c. Sub-substansi Fasilitasi Kerja Sama Pekon.
- 5. Bidang Pemerintahan Pekon, membawahi :
 - a. Sub-substansi tata Kelola Administrasi Pekon;

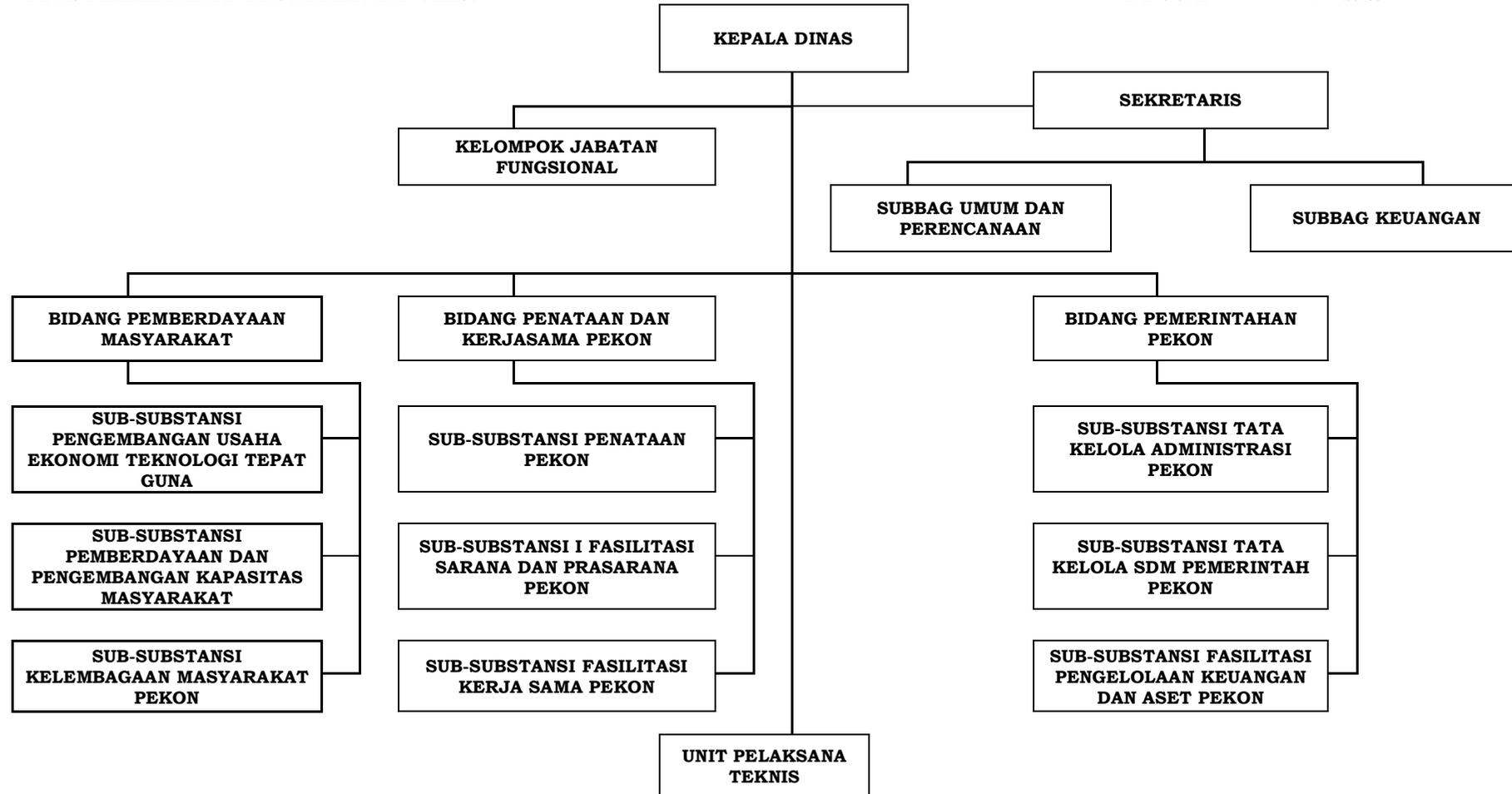


- b. Sub-substansi Tata Kelola Sumber daya Manusia Pemerintahan Pekon; dan
- c. Sub-substansi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 70 TAHUN 2021
30 DESEMBER
TANGGAL : 2020



Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

2.2. SUMBERDAYA OPD

2.2.1. SUMBERDAYA MANUSIA

Kondisi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.

Daftar Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
		PNS	THLS
1.	Kepala Dinas	1	-
2.	Sekretariat	6	7
3.	Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Pekon Masyarakat	7	3
4.	Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon	4	4
5.	Bidang Pemerintahan Pekon	7	4
Jumlah Aparatur		25	18

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai.

Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat:



Tabel 2
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	16
3.	Diploma III (D3)	3
4.	SLTA	0
Jumlah Aparatur		25 Orang

Tabel 3
Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
menurut Golongan Khusus untuk ASN

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	5
5.	Penata (III/c)	4
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
7.	Penata Muda (III/a)	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
9.	Pengatur (II/c)	2
Jumlah Aparatur		25 Orang



2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :

1. Gedung : 1 Unit
2. Mini Bus Roda Empat : 2 Unit
3. Sepeda Motor : 6 Unit

Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :

1. Komputer : 5 Unit
2. Laptop : 7 Unit
3. Filling Kabinet : 16 Unit
4. Lemari : 6 Unit
5. Meja : 42 Unit
6. Kursi Lipat : 60 Unit
7. Kursi Putar : 13 Unit
8. Diesel : 2 Unit
9. Faximile : 1 Unit
10. Mobile Filling : 1 Unit
11. Sofa : 2 Unit
12. Mesin Ketik : 2 Unit
13. LCD Projector/Infocus : 1 Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan pekon, sesuai dengan urusan bidangnya yakni pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Pekon.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2023-2026 dan pencapaian target kinerja sebagai berikut :



Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pencapaian target kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pekon Tertinggal (Berdasarkan Instrumen Evaluasi Perkembangan Pekon)				2,29 %	4,58%	6,87%	9,16%	11,45%	2,29 %	4,58%	6,87%	9,16%	11,45%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase BUMPekon Berkembang				0	0	0	0	3,82%	0	0	0	0	3,82%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pekon yang Melaksanakan Gotong Royong				0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase UP2K PKK aktif				0	0	0	2,29%	4,58%	0	0	0	2,29%	4,58%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon Tepat Waktu				30%	40%	50%	60%	65%	30%	40%	50%	60%	65%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase LHP Aktif				30%	40%	50%	60%	65%	30%	40%	50%	60%	65%	100%	100%	100%	100%	100%



Indikator Kinerja : Persentase Pekon Tertinggal (Berdasarkan Instrumen Evaluasi Perkembangan Pekon)

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% yaitu 11,45% dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 11,45%.

Indikator Kinerja : Persentase BUMPekon Berkembang

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% yaitu 3,82% dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 3,82%.

Indikator Kinerja : Persentase Pekon yang Melaksanakan Gotong Royong

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% yaitu 100% dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 100%.

Indikator Kinerja : Persentase UP2K PKK aktif

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% yaitu 4,58% dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 4,58%.

Indikator Kinerja : Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon Tepat Waktu

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% yaitu 65% dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 65%.

Indikator Kinerja : Persentase LHP Aktif

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% yaitu 65% dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 65%



Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA LANGSUNG				0	0					0	97%	98%	97,47 %	98,66 %	91,77 %	%	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				264.605.000	3.080.404.987				252.139.949	2.826.922.915	99%	97%	98,73 %	95,29 %	91,77 %	%	%
Program Penataan Desa				154.865.000	846.910.000				151.755.000	844.563.850	91%	96%	91,97 %	97,99 %	99,72 %	%	%
Program Administrasi Pemerintahan Desa				65.000.000	1.045.952.700				50.537.588	1.017.260.000	100%	100%	100%	77,75 %	97,26 %	%	%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hokum Adat				56.700.000	844.101.200				56.700.000	840.240.242	100%	100%	100%	100,00 %	99,54 %	569,97%	0,00 %



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya penggunaan data base pekon

Upaya menggerakkan pembangunan pekon berbasis potensi lokal dapat diukur sejauh mana data sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh pekon. Responsitas terhadap pengisian data profil setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan pekon secara real. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumber daya dan potensi pekon dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat pekon kurang dan hampir tidak menggunakan data base pekon sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan pekon.

2. Kurang berfungsinya lembaga dan organisasi masyarakat pekon

Lembaga kemasyarakatan di pekon sebagai penggerak utama dalam pembangunan pekon kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat pekon untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pekon, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program pembangunan dan paska pelaksanaannya kurang dimiliki sebagian masyarakat. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga kemasyarakatan pekon dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Melemahnya usaha ekonomi masyarakat

Peningkatan perekonomian pekon melalui badan usaha milik pekon (BUMPekon), kelompok – kelompok usaha



masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian pekon akan mendorong stabilitas perekonomian pekon pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya.

4. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya, potensi desa dan teknologi tepat guna serta lingkungan hidup

Sumber daya di pekon yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi pekon yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat pekon dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pekon masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan stimulasi transaformasi ilmu pengetahuan teknologi terapan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup di pekon.

Adapun Peluang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah :

1. Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan pekon sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon.
2. **Peran strategis Dinas** Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam upaya



meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan saran dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
4. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program – program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2023-2026 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pemberdayaan masyarakat dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Optimalisasi kinerja pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat di upayakan dengan menggali peluang-peluang program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :



Tabel 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pekon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pekon 2. Rendahnya kualitas Pokjantal Posyandu Kecamatan/Pekon/Kelurahan dan Kader Posyandu 3. Belum kuatnya pondasi perekonomian pekon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan pekon 2. Kualitas Kader Posyandu perlu ditingkatkan 3. Kelembagaan ekonomi pekon belum berfungsi secara optimal
2.	Rendahnya tata kelola manajemen dan administrasi pemerintahan pekon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pekon belum maksimal 2. KinerjaKelembaga Pekon belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Tenaga Pengelola kegiatan dan Administrasi Keuangan yang bersertifikat 2. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Pekon. 3. Kualitas Anggota Lembaga Kemasyarakatan (LHP dan LPMP)masih perlu ditingkatkan.



3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 4 (Empat) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan pekon.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan diperdesaan
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
5. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
6. Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah pekon
7. Masih kurangnya tingkat pemahaman SDM dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan
8. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender



9. Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi tepat guna(TTG)
10. Diberlakukanya undang -undang no 6 tahun 2014 tentang desa dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
11. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan dan 131 Pekon. Berdasarkan Indeks kemajuan Desa tahun 2023 jumlah pekon mandiri Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan cukup tinggi. Dimana pada tahun 2023 jumlah pekon Mandiri sebanyak 45 pekon, Pada umumnya pekon mandiri yang ada di Kabupaten Lampung Barat merupakan pekon yang sudah memenuhi kriteria.

Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif Indikator sasaran Persentase Desa Mandiri Untuk pencapaintujuan di atas maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan			
			2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa	Persentase Desa mandiri	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%



Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2035	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa mandiri	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan harus diupayakan untuk dicapai secara bertahap. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat diperlukan adanya kerja kolektif dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* pembangunan. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baru diperlukan perubahan atau penyesuaian paradigma pembangunan menuju peningkatan partisipasi masyarakat.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, yang mengacu pada tiga arus utama (*Mainstream*) perubahan paradigma pembangunan, yaitu dengan mengubah arah ke arah yang tepat (Reorientasi), penempatan diri pada posisi yang tepat (Reposisi), dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (Revitalisasi).



Tabel 9 Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan pekon dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kemandirian masyarakat pekon 2. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga 3. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

6.1. RENCANA PROGRAM

Rencana program untuk Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintah Desa
4. Program Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

6.2. RENCANA KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyelenggaraan Penataan Desa



9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintah Daerah
10. Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupate/Kota

6.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Selama periode waktu 2023-2026. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama Dinas PMP Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2023-2026

TUJUAN : MENINGKATNYA DESA MANDIRI					
SASARAN	INDIKATOR SASARAN / (IKU)	TARGET			
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa Mandiri	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%



6.4. KELOMPOK SASARAN

Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Alam merupakan faktor penentu pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon. Tercapainya pembangunan perlu ditentukan kelompok sasaran berdasarkan Wilayah/Lokasi, SDA dan SDM.

a. Sasaran Wilayah/Lokasi

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dilaksanakan di 15 Kecamatan, 131 Pekon dan 5 Kelurahan yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat.

b. Sasaran Sumberdaya Manusia

Seluruh aparatur pemerintahan Pekon dan Kelurahan yang ada di 131 Pekon dan 5 Kelurahan yaitu Peratin, Juru Tulis dan Pemangku/Kaling.

c. Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan di lingkup pekon

6.5. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan financial yang mencukupi.

Dana indikatif yang diperlukan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun ke Empat Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sejumlah **Rp. 47.245.955.302 (Empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua rupiah)**.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam empat tahun mendatang. Adapun indikator kinerja daerah RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 terkait dengan bidang Penataan Desa yaitu Meningkatnya desa mandiri.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut ;



Tabel 11. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD	Target Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel, Inovatif dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Desa Mandiri	35,88%	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%	0%



Tabel 12.
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase Desa mandiri	35,88%	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%	%



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja OPD dalam kurun waktu empat tahun (2023-2026), sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Disadari bahwa untuk mencapai target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 tidaklah mudah, namun jika dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, kerja keras dan kerja tuntas dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Kami optimis bahwa target tersebut dapat dicapai. Tidak kalah penting adalah dukungan dan sinergitas para pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama, serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Pada akhirnya, program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2023-2026 ini dapat di implementasikan sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

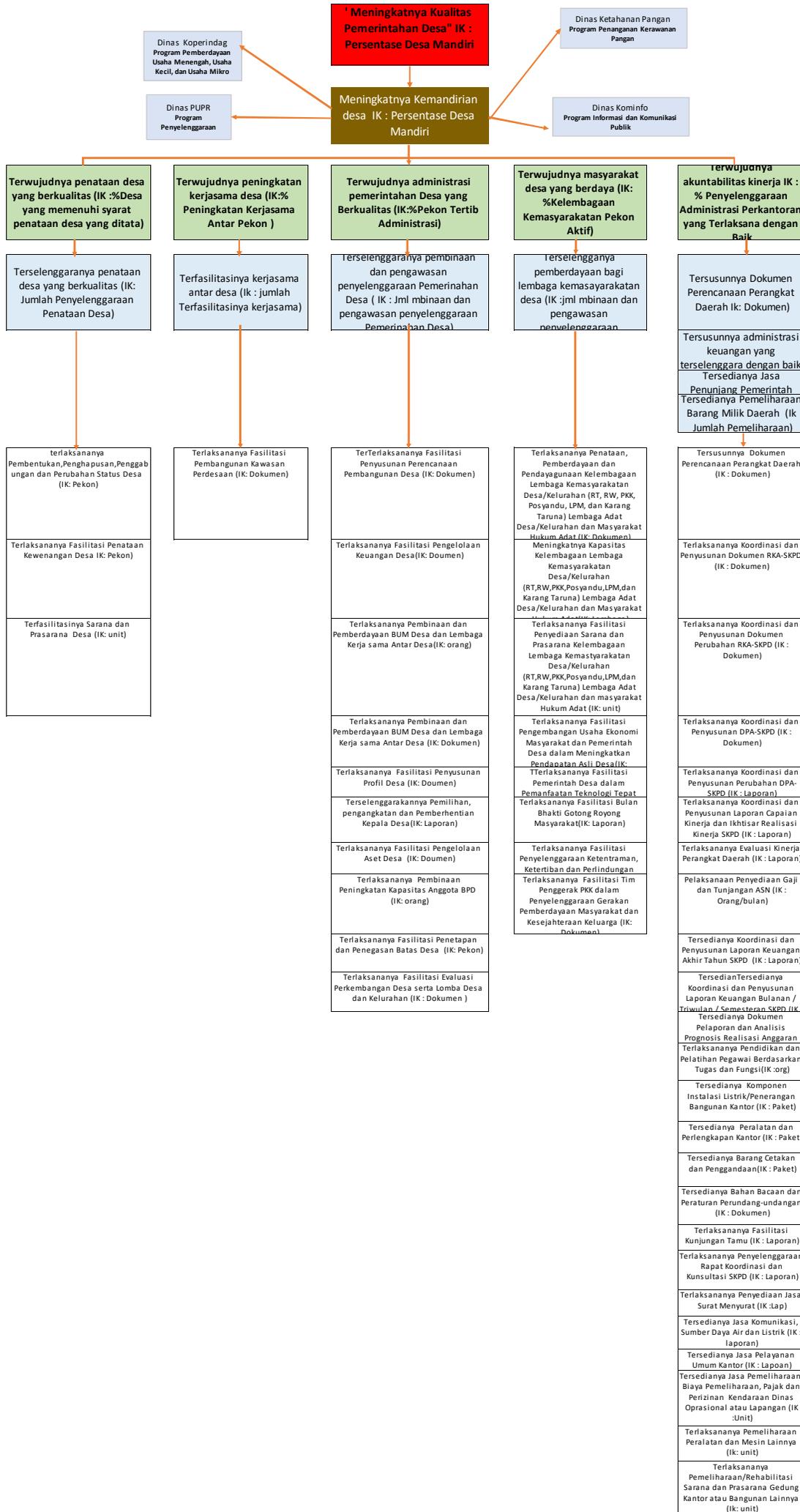
Liwa, 31 Maret 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEKON







CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

RPD / RPJMD 2023-2026

TUJUAN						
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan						
Indikator Tujuan	Satuan	Target				
		2023	2024	2025	2026	
Nilai Repormasi Birokrasi (RB)	Poin	57,05	58,05	59,05	60,05	

SASARAN						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan						
Indikator Sasaran	Satuan	Target				
		2023	2024	2025	2026	
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Poin	57,05	58,05	59,05	60,05	

TUJUAN						
Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa						
Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
% Desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa	%	37,40%	39,69%	41,22 %	42,75%

SASARAN						
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif						
Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
% Desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa	%	37,40%	39,69%	41,22 %	42,75%

RENSTRA 2023-2026

PROGRAM							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA							
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Sajak Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	poin	80,00	81,00	81,5	82,00

KEGIATAN							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	8	8	8	8

SUBKEGIATAN						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	2	2	2

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	12	12	12	12

KEGIATAN							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi Keuangan	banyaknya Orang yang menerima Gaji dan	Dokumen	4	4	4	4

SUBKEGIATAN						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	27	27	27	27

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Laporan	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	Dokumen	2	2	2	2

SUBKEGIATAN						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Orang	2	2	2	2

KEGIATAN							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian	Dokumen	2	2	2	2

KEGIATAN							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
Meningkatnya kualitas Administrasi umum	Jumlah pengadministrasian umum	Jumlah Adminisrasi umum	Laporan	6	6	6	6

SUBKEGIATAN						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Bangunan	Paket	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	7	7	7	7

SUBKEGIATAN						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	9	9	9	9

SUBKEGIATAN						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	4	4	4	6

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pasilitasi Kunjungan	Laporan	12	12	12	12

SUBKEGIATAN						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat	Laporan	12	12	12	12

KEGIATAN							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026

SUBKEGIATAN							
Pengadaan Mebel							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
				2018	2019	2020	2021

Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah	Unt	2	2	2	2
---	---	---	-----	---	---	---	---

Terlaksananya Pe Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unt	2	2	2	2
---	------------------------------	-----	---	---	---	---

SUBKEGIATAN						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unt	2	2	2	2

KEGIATAN							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersedianya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Surat Menyurat	Banyaknya Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang	Laporan	2	2	2	2

SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4

KEGIATAN							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah dipelihara							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Laporan	4	4	4	4

SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	9	9	9	9

SUB KEGIATAN						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	12	12	12	12

SUB KEGIATAN						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	1	1	1	1

PROGRAM							
PROGRAM PENATAAN DESA							
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Penataan pekon	Persentase desa yang memenuhi syarat penataan desa yang	Jumlah desa yang ditata dibagi Jumlah desa yang memenuhi syarat untuk	%	100	100	100	100

KEGIATAN							
Penyelenggaraan Penataan Desa							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan dan	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan dan	Banyaknya Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan dan	Pekon	131	131	131	131
Terlaksananya Fasilitas Penataan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Banyaknya Desa yang Terfasilitasi	Pekon	131	131	131	131
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Banyaknya Sarana dan Prasarana	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa						
Sasaran SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan	Pekon	131	131	131	131

SUBKEGIATAN						
-------------	--	--	--	--	--	--

PROGRAM							
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon	(jumlah kerjasama desa tahun n dikurangi tahun n-1) dibagi (jumlah	%	2.29	2.29	2.29	2.29

PROGRAM							
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Pekon Tertib Administrasi	Jumlah pekon tertib administrasi/jumlah pekon*100%	%	100	100	100	100

KEGIATAN							
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Banyaknya Dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	1

KEGIATAN							
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan	Banyaknya Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	2	2	2	2
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa yang Kapasitas dan Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan	Dokumen	1	1	1	1
Terlaksananya Fasilitasi Terselenggaranya Pemilihan	Jumlah laporan Hasil pemilihan penyelenggara	Banyaknya Laporan Hasil pemilihan penyelenggara	Laporan	60	11	11	11
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Desa	Banyaknya Dokumen Hasil Penyusunan Profil Desa	Dokumen	136	136	136	136
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Banyaknya Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	2	2	2	2
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Anggota BPD yang Berkembang	Jumlah Anggota BPD yang Berkembang	Banyaknya Anggota BPD yang Berkembang	Orang	262	262	262	262
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	Banyaknya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	Dokumen	1	1	1	1

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Pekon	131	131	131	131

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan	Dokumen	2	2	2	2

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	60	393	393	393

SUBKEGIATAN						
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

terseleksi	Jumlah laporan Hasil				
nya Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	penyelenggara an Pemilihan Pengangkatan dan	Laporan	60	11	11

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	136	136	136	136

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	2	2	2	2

SUBKEGIATAN						
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Menikuti	Orang	262	262	262	262

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam	Pekon	10	10	10	10

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah Dokumen Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Dokumen	2	2	2	2

SUBKEGIATAN						
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Lembaga	4	4	4	4

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Sarana dan					

PROGRAM							
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	60%	65%	70%	75%

KEGIATAN							
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di tingkat Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Banyaknya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	2	2	2	2
Meningkatkan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Lembaga	4	4	4	4
Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Banyaknya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Unit	1	1	1	1
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Banyaknya Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen	1	1	1	1
Terlaksananya Fasilitasi Laporan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Banyaknya Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	1	1	1	1
Terlaksananya Fasilitasi Laporan Bulan Bakti	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Banyaknya Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	1	1	1	1
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Banyaknya Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen	1	1	1	1
Terlaksananya Fasilitasi Tim Bergerak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	Banyaknya Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Sarana dan					

Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Unit	1	1	1	1
--	------	---	---	---	---

SUBKEGIATAN

ngan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pe

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat D

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

gerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kes

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	Dokumen	1	1	1	1

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 poin	80 poin		3,561,535,300	80 poin	4,095,764,995	81 poin	4,710,130,434	81,5 poin	5,416,649,999	82 poin	17,764,080,729	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	39,489,000	25 Dokumen	45,412,350	25 Dokumen	52,224,203	25 Dokumen	60,057,833	8 Dokumen	197,183,385	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	54 Dokumen	54 Dokumen	8 Dokumn	3,745,000	8 Dokumn	4,306,750	8 Dokumn	4,952,763	8 Dokumen	5,695,677	32 Dokumen	18,700,189	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	6,825,000	1 Dokumen	7,848,750	1 Dokumen	9,026,063	1 Dokumen	10,379,972	4 Dokumen	34,079,784	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5,725,000	1 Dokumen	6,583,750	1 Dokumen	7,571,313	1 Dokumen	8,707,009	4 Dokumen	28,587,072	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3,765,000	1 Dokumen	4,329,750	1 Dokumen	4,979,213	1 Dokumen	5,726,094	4 Dokumen	18,800,057	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	5,807,500	1 Dokumen	6,678,625	1 Dokumen	7,680,419	4 Dokumen	25,216,544	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	2,643,850	1 Laporan	3,040,428	1 Laporan	3,496,492	4 Laporan	11,479,769	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	12 Laporan	12,080,000	12 Laporan	13,892,000	12 Laporan	15,975,800	12 Laporan	18,372,170	48 Laporan	60,319,970	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumah Dokumen administrasi Keuangan yang disusun	45 Dokumen	5 Dokumen	4 Laporan	2,733,980,700	27 Orang/Bulan	3,144,077,805	5 Dokumen	3,615,689,476	5 Dokumen	4,158,042,897	5 Dokumen	13,651,790,878	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	2,726,470,700	27 Orang/Bulan	3,135,441,305	27 Orang/Bulan	3,605,757,500.75	27 Orang/Bulan	4,146,621,126	27 Orang/Bulan	13,614,290,632	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	3,110,000	1 Laporan	3,576,500	1 Laporan	4,112,975.00	1 Laporan	4,729,921	1 Laporan	15,529,396	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1,890,000	2 Laporan	2,173,500	2 Laporan	2,499,525.00	2 Laporan	2,874,454	2 Laporan	9,437,479	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

		2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,510,000	2 Dokumen	2,886,500	2 Dokumen	3,319,475,000	2 Dokumen	3,817,396	2 Dokumen	12,533,371	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.05	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepagawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	11,500,000	2 Dokumen	13,225,000	2 Dokumen	15,208,750	2 Dokumen	49,933,750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	11,500,000	2 Dokumen	13,225,000	2 Dokumen	15,208,750	2 Dokumen	49,933,750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan	6 sub	6 sub	6 sub	308,863,000	6 sub	358,191,850	6 sub	414,921,318	6 sub	480,159,515	24 sub	1,562,135,683	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Ruang Kantor	Jumlah paket Instalasi Listrik/Bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	3,150,000	8 Paket	3,622,500	8 Paket	4,165,875	8 Paket	4,790,756	8 Paket	15,729,131	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	98,294,000	7 Paket	113,038,100	7 Paket	129,993,815	7 Paket	149,492,887	7 Paket	490,818,802	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang	9 Paket	9 Paket	9 Paket	45,495,000	9 Paket	52,319,250	9 Paket	60,167,138	9 Paket	69,192,208	9 Paket	227,173,596	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	5,761,500	4 Dokumen	6,625,725	4 Dokumen	7,619,584	6 Dokumen	25,016,809	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.06.08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pasilitasi Kunjungan Tamu Perbulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7,650,000	12 Laporan	8,797,500	12 Laporan	10,117,125	12 Laporan	11,634,694	12 Laporan	38,199,319	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	149,264,000	12 Laporan	174,653,000	12 Laporan	203,851,640	12 Laporan	237,429,386	12 Laporan	765,198,026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0	0	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	10,000,000	2 unit	10,000,000	2 unit	10,000,000	2 unit	10,000,000	2 unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	
		2.13.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3Sub	3Sub	3Sub	204,808,400	3Sub	235,529,660	3Sub	270,859,109	3Sub	311,487,975	12 Sub	1,022,685,144	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	594 surat	594 Surat	1 Laporan	6,440,000	1 Laporan	7,406,000	1 Laporan	8,516,900	1 Laporan	9,794,435	4 Laporan	32,157,335	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	31,210,000	4 Laporan	35,891,500	4 Laporan	41,275,225	4 Laporan	47,466,509	4 Laporan	155,843,234	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	167,158,400	4 Laporan	192,232,160	4 Laporan	221,066,984	4 Laporan	254,227,032	4 Laporan	834,684,576	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang di adakan	12 Unit	12 Unit	22 unit	244,394,200	22 unit	281,053,330	22 unit	323,211,330	22 unit	371,693,029	12 Unit	1,220,351,888	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	186,455,200	9 Unit	214,423,480	9 Unit	246,587,002	9 Unit	283,575,052	9 Unit	931,040,734	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	7,650,000	12 Unit	8,797,500	12 Unit	10,117,125	12 Unit	11,634,694	12 Unit	38,199,319	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Yunit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50,289,000	1 Unit	57,832,350	1 Unit	66,507,203	1 Unit	76,483,283	1 Unit	251,111,835	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	100%	100%	100%	1,067,878,500	100%	1,228,060,275	100%	1,412,269,316	100%	1,624,109,714	100%	368,857,023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan	5 Pekon	131 Pekon	131 Pekon	-	131 Pekon	-	131 Pekon	-	131 Pekon	-	131 Pekon	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	131 Pekon	131 Pekon	131 Pekon	-	131 Pekon	-	131 Pekon	-	131 Pekon	368,857,023	131 Pekon	368,857,023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Pekon	2 Unit	2 Unit	-	1 Pekon	-	1 Pekon	-	1 Pekon	-	1 Pekon	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa Yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan	131 Pekon	131 Pekon	131 Pekon	120,096,500	131 Pekon	138,110,975	131 Pekon	158,827,621.25	131 Pekon	182,651,764	131 Pekon	599,686,861	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	131 Pekon	131 Pekon	131 Pekon	95,711,000	131 Pekon	110,067,650	131 Pekon	126,577,797.50	131 Pekon	145,564,467	131 Pekon	477,920,915	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	2 Unit	2 Unit	852,071,000	1 Pekon	979,881,650	1 Pekon	1,126,863,897.50	1 Pekon	1,295,893,482	1 Pekon	4,254,710,030	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan	2,29%	2,29%	2,29%	209,459,000	2,29%	240,877,850	2,29%	277,009,528	2,29%	318,560,957	2,29%	1,045,907,334	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	209,459,000	1 Dokumen	240,877,850	1 Dokumen	277,009,528	1 Dokumen	318,560,957	1 Dokumen	1,045,907,334	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	209,459,000	1 Dokumen	240,877,850	1 Dokumen	277,009,528	1 Dokumen	318,560,957	1 Dokumen	1,045,907,334	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%	100%	100%	3,120,859,550	100%	3,588,988,483	100%	4,127,336,755	100%	4,746,437,268	100%	15,583,622,055	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pemabngunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	393 Dokumen	240,030,500	393 Dokumen	276,035,075	393 Dokumen	317,440,336	393 Dokumen	365,056,387	393 Dokumen	1,198,562,298	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Dokumen Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	91,951,700	2 Dokumen	105,744,455	2 Dokumen	121,606,123	2 Dokumen	399,260,278	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti pembinaan Peningkatan Kapasitas	393 Orang	393 Orang	60 Orang	203,168,500	393 Orang	233,643,775	393 Orang	268,690,341	393 Orang	308,993,892	393 Orang	1,014,496,509	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107,864,000	1 Dokumen	124,043,600	1 Dokumen	142,650,140	1 Dokumen	164,047,661	1 Dokumen	538,605,401	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah laporan Hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	60 Laporan	60 Laporan	1 Laporan	1,413,844,250	1 Laporan	1,625,920,888	1 Laporan	1,869,809,021	1 Laporan	2,150,280,374	1 Laporan	7,059,854,532	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Dokumen Profil Desa	136 Dokumen	136 Dokumen	136 Dokumen	242,036,500	136 Dokumen	278,341,975	136 Dokumen	320,093,271	136 Dokumen	368,107,262	136 Dokumen	1,208,579,008	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	131 Dokumen	115,127,700	131 Dokumen	132,396,855	131 Dokumen	152,256,383	131 Dokumen	175,094,841	131 Dokumen	574,875,779	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	262 Orang	262 Orang	105 Orang	196,956,000	105 Orang	226,499,400	105 Orang	260,474,310	105 Orang	299,545,457	105 Orang	983,475,167	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan	10 Pekon	10 Pekon	10 Pekon	131494100	10 Pekon	151,218,215	10 Pekon	173,900,947	10 Pekon	199,986,089	10 Pekon	656,599,352	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa

				Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	390,380,000	1 Dokumen	448,937,000	1 Dokumen	516,277,550	1 Dokumen	593,719,183	1 Dokumen	1,949,313,733		
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	393 Dokumen	240,030,500	393 Dokumen	276,035,075	393 Dokumen	317,440,336	393 Dokumen	365,056,387	393 Dokumen	1,198,562,298	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	91,951,700	2 Dokumen	105,744,455	2 Dokumen	121,606,123	2 Dokumen	399,260,278	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	393 Orang	393 Orang	60 Orang	203,168,500	393 Orang	233,643,775	393 Orang	268,690,341	393 Orang	308,993,892	393 Orang	1,014,496,509	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan BUMDes dan lembaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107,864,000	1 Dokumen	124,043,600	1 Dokumen	142,650,140	1 Dokumen	164,047,661	1 Dokumen	538,605,401	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan pemilihan Pengangkatn dan pemberhentian Kepala Desa	60 Laporan	60 Laporan	1 Laporan	1,413,844,250	1 Laporan	1,625,920,888	1 Laporan	1,869,809,021	1 Laporan	2,150,280,374	1 Laporan	7,059,854,532	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	136 Dokumen	136 Dokumen	136 Dokumen	242,036,500	136 Dokumen	278,341,975	136 Dokumen	320,093,271	136 Dokumen	368,107,262	136 Dokumen	1,208,579,008	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	131 Dokumen	115,127,700	131 Dokumen	132,396,855	131 Dokumen	152,256,383	131 Dokumen	175,094,841	131 Dokumen	574,875,779	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan peningkatan	262 Orang	262 Orang	105 Orang	196,956,000	105 Orang	226,499,400	105 Orang	260,474,310	105 Orang	299,545,457	105 Orang	983,475,167	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang dipasilitasi dalam penetapan dan	10 Pekon	10 Pekon	10 Pekon	131,494,100	10 Pekon	151,218,215	10 Pekon	173,900,947	10 Pekon	199,986,089	10 Pekon	656,599,352		
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	390,380,000	1 Dokumen	448,937,000	1 Dokumen	516,277,550	1 Dokumen	593,719,183	1 Dokumen	1,949,313,733	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN I LEMBAGA	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	100%	100%	60%	1,501,995,500	65%	1,727,294,825	70%	1,986,389,049	75%	2,284,347,406	75%	7,500,026,780	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,L,PM, dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	146,924,000	4 Lembaga	168,962,600	4 Lembaga	194,306,990	4 Lembaga	223,453,038.50	4 Lembaga	733,646,629	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	275,267,000.00	2 Dokumen	316,557,050	2 Dokumen	364,040,608	2 Dokumen	418,646,698.63	2 Dokumen	1,374,511,356	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,L,PM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	168,658,000	1 Unit	193,956,700	1 Unit	223,050,205	1 Unit	256,507,735.75	1 Unit	842,172,641	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142,265,500	1 Dokumen	163,605,325	1 Dokumen	188,146,124	1 Dokumen	216,368,042.31	1 Dokumen	710,384,991	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

				Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	147,990,000	1 Laporan	170,188,500	1 Laporan	195,716,775	1 Laporan	225,074,291.25	1 Laporan	738,969,566	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120,640,000	1 Laporan	138,736,000	1 Laporan	159,546,400	1 Laporan	183,478,360.00	1 Laporan	602,400,760	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	87,388,000	1 Dokumen	100,496,200	1 Dokumen	115,570,630	1 Dokumen	132,906,224.50	1 Dokumen	436,361,055	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	412,863,000	1 Dokumen	474,792,450	1 Dokumen	546,011,318	1 Dokumen	627,913,015.13	1 Dokumen	2,061,579,783	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa		
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Peningkatan Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	146,924,000.00	2 Dokumen	168,962,600	2 Dokumen	194,306,990	2 Dokumen	223,453,038.50	2 Dokumen	733,646,629	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa		
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	275,267,000.00	4 Lembaga	316,557,050	4 Lembaga	364,040,608	4 Lembaga	418,646,698.63	1,374,511,356	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	168,658,000	1 Unit	193,956,700	1 Unit	223,050,205	1 Unit	256,507,736	842,172,641	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142,265,500	1 Dokumen	163,605,325	1 Dokumen	188,146,124	1 Dokumen	216,368,042	710,384,991	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	147,990,000	1 Laporan	170,188,500	1 Laporan	195,716,775	1 Laporan	225,074,291	738,969,566	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120,640,000	1 Laporan	138,736,000	1 Laporan	159,546,400	1 Laporan	183,478,360	602,400,760	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	87,388,000	1 Dokumen	100,496,200	1 Dokumen	115,570,630	1 Dokumen	132,906,225	436,361,055	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	412,863,000	1 Dokumen	474,792,450	1 Dokumen	546,011,318	1 Dokumen	627,913,015	2,061,579,783	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa			
								9,461,727,850				10,880,986,428				12,513,135,082				14,390,105,344

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan				Nilai Repormasi Birokrasi (RB)	57,05 poin	57,05 poin		58,05 poin		59,05 poin		60,05 poin		0 poin		60,05 poin			
	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa			% Desa Mandiri	35,88%	37,40%		39,69%		41,22%		42,75%							
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	0 %	7,63 %	330,628,500	7,63 %	380,222,775	7,63 %	437,256,191	7,63 %	502,844,620	0 %	0	7,63 %	0		
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan/Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	0 Pekon	5 Pekon	120,096,500	5 Pekon	138,110,975	5 Pekon	158,827,621	5 Pekon	182,651,764	0 Pekon	0	5 Pekon	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	0 %	2,29 %	186,795,000	2,29 %	214,814,250	2,29 %	247,036,388	2,29 %	284,091,846	0 %	0	2,29 %	0		
		2.13.03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	0 Dokumen	1 Dokumen	90,819,000	1 Dokumen	104,441,850	1 Dokumen	120,108,128	1 Dokumen	138,124,347	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	0 %	100 %	2,846,611,850	100 %	3,273,605,928	100 %	3,764,646,017	100 %	4,329,343,839	0 %	0	100 %	0		
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	4,229,965,150	2 Dokumen	5,038,256,553	2 Dokumen	5,793,995,037	2 Dokumen	6,663,094,292	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	0 %	60 %	1,484,554,300	65 %	1,707,237,445	70 %	1,963,323,062	75 %	2,257,821,521	0 %	0	80 %	0		
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	4 Lembaga	275,909,200	4 Lembaga	317,295,580	4 Lembaga	364,889,917	4 Lembaga	419,623,405	0 Lembaga	0	4 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 poin	80 Poin	4,046,594,260	81 poin	4,743,942,983	81,5 poin	5,455,534,435	82 poin	6,273,864,602	82 Poin	0	80,00 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat daerah	0 Dokumen	11 Dokumen	39,489,000	8 Dokumen	36,909,653	11 Dokumen	42,446,103	8 Dokumen	48,813,021	0 Dokumen	0	11 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	0 Org/Bulan	27 Org/Bulan	2,733,980,700	27 Org/Bulan	3,146,682,555	27 Org/Bulan	3,618,684,938	27 Org/Bulan	4,161,487,680	0 Org/Bulan	0	27 Org/Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	13,225,000	2 Dokumen	15,208,750	2 Dokumen	17,490,063	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diselesaikan	0 Paket	8 Paket	328,863,000	8 Paket	323,510,842	8 Paket	372,037,471	8 Paket	427,843,092	0 Paket	0	8 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	0 Laporan	2 Laporan	691,732,080	2 Laporan	944,706,031	2 Laporan	1,086,411,936	2 Laporan	1,249,373,725	0 Laporan	0	2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	0 Unit	22 Unit	242,529,480	22 Unit	278,908,902	22 Unit	320,745,237	22 Unit	368,857,023	0 Unit	0	22 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0		2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	